

LAPORAN PENELITIAN

PENGENKAJIAN MATERI BAHAN BELAJAR ( MODUL )  
PIH/PTHI DITINJAU DARI HASIL EVALUASI  
BELAJAR MAHASISWA FISIP. UT

*disusun oleh:*

D A R Y O N O

NIP. 131 866 185

UNIVERSITAS TERBUKA

25 lbr  
Drs

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA

APRIL 1990

80108

*laporan penelitian*

PENGKAJIAN MATERI BAHAN BELAJAR / MODUL PIH/PTHI  
DITINJAU DARI HASIL EVALUASI BELAJAR MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN FISIP UT.

oleh

**DARYONO**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA  
APRIL 1990

Lembar Pengesahan

LAPORAN PENELITIAN

PENGKAJIAN MATERI BAHAN BELAJAR ( MODUL ) PIH / PTHI  
DITINJAU DARI HASIL EVALUASI BELAJAR MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN FISIP UT.

disusun oleh

Nama : DARYONO  
NIP : 131 866 185  
Unit : FISIP UT

Mengetahui :

PEMBIMBING PENELITIAN



DR. Tarwotjo, MSc.

-----  
NIP 130 175 232

## DAFTAR ISI

	HAL
PENDAHULUAN	1
LANDASAN TEORITIS	3
TUJUAN PENELITIAN	6
METODE PENELITIAN	6
ANALISA DATA	8
KESIMPULAN DAN SARAN	21
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

UNIVERSITAS TERBUKA

## PENDAHULUAN

Metode belajar jarak jauh yang diselenggarakan oleh UT, pada saat ini masih menggunakan modul sebagai bahan belajar pokok mahasiswa, sehingga kualitas modul sangat menentukan hasil proses belajar mengajar di UT. Kualitas modul dapat ditinjau dari :

1. materi
2. penyajian

Mengingat modul modul UT. sebagian besar dibuat oleh dosen dosen senior yang ahli dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, jelas kiranya bahwa kualitas materinya dapat memenuhi, tetapi apakah penyajiannya sesuai dengan sistem belajar jarak jauh ( SBJJ ) atau sudah tepat dalam arti mudah untuk dipahami oleh pembaca masih perlu untuk dipertanyakan.

Melihat hal tersebut perlu dilakukan penelitian pengembangan materi bahan belajar berupa pengkajian terhadap penyajian materi modul khususnya mata kuliah PIH / PTHI apakah keseluruhan konsep yang disajikan dalam modul tersebut dapat dipahami oleh mahasiswa.

Penguasaan modul PIH/PTHI disamping tergantung pada kemampuan mahasiswanya juga dipengaruhi oleh penyampaian konsep tersebut ke dalam modul , karena di UT memakai metode belajar mandiri maka faktor yang terakhir itulah yang harus dilakukan pengkajian meliputi :

1. apakah kegiatan belajar mengajar melalui modul ini sudah dapat memenuhi sistem belajar jarak jauh.
2. apakah penyampaian modul sudah disusun berdasarkan SBJJ.
3. apakah setiap materi uraian kegiatan belajar dapat difahami oleh mahasiswa.
4. apakah penjelasan konsep konsep yang ada dalam modul dapat dipahami oleh mahasiswa.

Modul merupakan salah satu bahan materi pokok mahasiswa, sehingga materi didalam modul harus sudah mencakup materi inti dari mata

kuliah tersebut dan dikembangkan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas. Penyajian konsep konsep materi modul harus mudah untuk dipahami oleh mahasiswa / pembaca , mengingat mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri.

Karena modul merupakan sarana belajar ( bahan kuliah ) yang diprogramkan untuk dipakai belajar secara mandiri ( self instruksional ) maka penyajiannya harus sesuai dengan sistem belajar jarak jauh ( panduan penulisan modul, FISIP UT )

Melalui media ini pula penulis ingin mendapatkan feed back terhadap materi modul PIH / PTHI guna pengembangan modul ini selanjutnya.

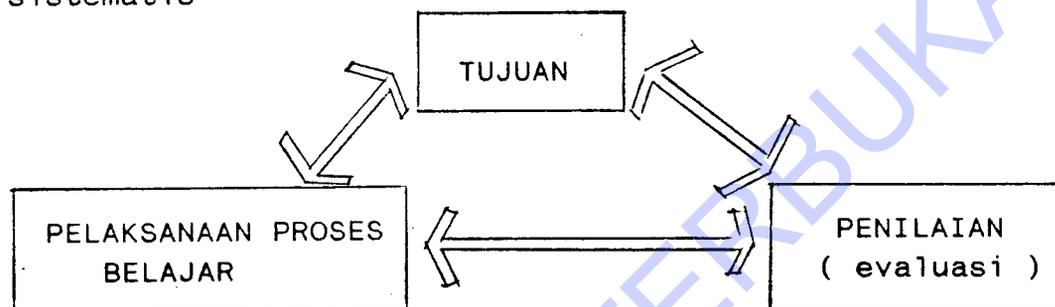
UNIVERSITAS TERBUKA

## LANDASAN TEORITIS

Keberhasilan suatu pendidikan banyak dipengaruhi oleh 3 faktor yang saling mempengaruhi, Tyler mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi :

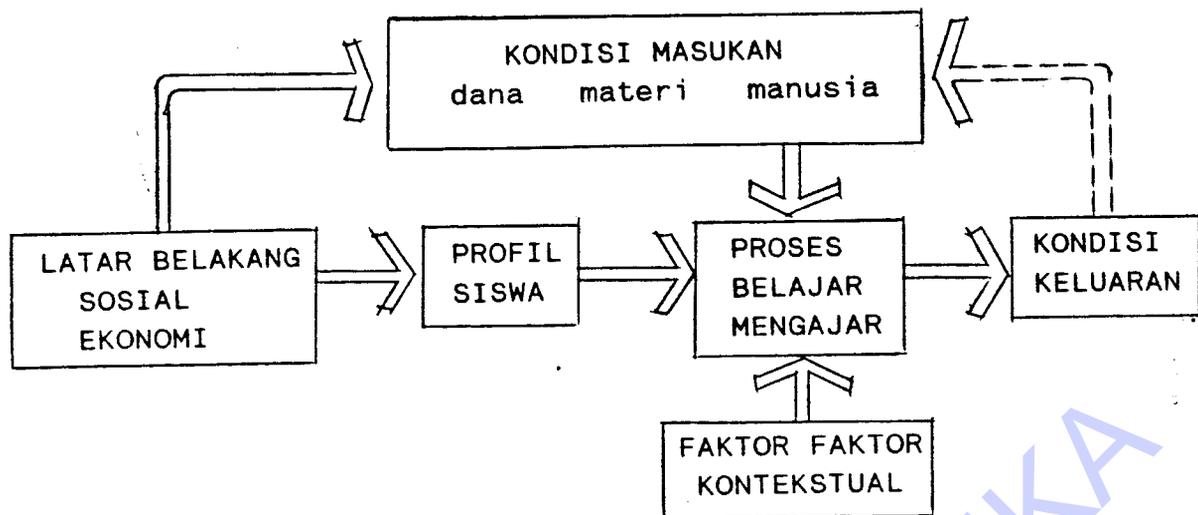
- tujuan pendidikan
- pelaksanaan proses belajar
- penilaian ( evaluasi hasil belajar )

ketiga komponen tersebut saling berinteraksi membentuk suatu pola yang sistematis



dari ragaan diatas terlihat keterkaitan timbal balik antara ketiga komponen tersebut, tujuan pendidikan memberikan arahan dan pola-pola tertentu yang harus dilaksanakan dalam proses belajar, demikian pula tujuan membentuk alat-alat dan standard evaluasi, sebagai masukan bagi decision maker. Proses belajar merupakan sarana atau tempat berlangsungnya pendidikan secara keseluruhan, berawal dan diarahkan oleh tujuan pendidikan dan dilihat hasilnya oleh evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan parameter terhadap keberhasilan proses belajar dan sebagai input dalam menetapkan tujuan selanjutnya. Demikian seterusnya sehingga ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem yang saling berhubungan.

Pendidikan mencakup berbagai faktor membentuk suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, kondisi tersebut secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut



Ragaan diatas mencerminkan kondisi kondisi yang dapat dipergunakan sebagai model dalam peningkatan mutu pendidikan ( DEPDIBUD ) . Proses belajar mengajar sebagai titik sentral peningkatan mutu pendidikan merupakan pusat interaksi dari sub sistem sub sistem , kondisi masukan meliputi sumber daya dana , materi dan manusia memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap jalannya proses belajar mengajar, demikian pula profil dari siswa ikut andil dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh kondisi keluaran ( out put ) , sekaligus sebagai umpan balik bagi kondisi kondisi masukan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses belajar selanjutnya.

Tujuan pendidikan merupakan salah satu kondisi masukan yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum, kurikulum mencakup tujuan kurikuler suatu pendidikan . Tujuan kurikuler pendidikan dioperasionalisasi oleh tujuan instruksional, dimaksudkan agar tujuan kurikuler dapat dipilah menjadi tujuan tujuan yang bersifat lebih khusus ( spesifik ) .

Tujuan Instruksional dipilah menjadi

a. tujuan instruksional umum  
merupakan suatu tujuan yang mengaharapkan agar siswa dapat mempelajari suatu bagian ilmu pengetahuan.

b. tujuan instruksional khusus  
Penjabaran tujuan instruksional yang mencerminkan tahapan tujuan instruksional umum secara khusus.

Pengembangan program pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan

- pendidikan yang dikemukakan oleh BLOMM mencakup beberapa ranah :
1. **Cognitif Domain** , berkenaan dengan proses berfikir , meliputi kemampuan mengingat, memahami, menerangkan, menganalisa, mensintesa dan mengevaluasi .
  2. **Psychomotoric domain**, berkenaan dengan keterampilan panca indera, kemampuan melakukan suatu gerakan, merangkaikan gerakan, melakukan gerakan dengan tepat dan wajar.
  3. **Affective domain**, berkenaan dengan hati nurani , kemampuan bersikap.

Dalam pendidikan secara tatap muka tujuan kurikuler dapat dikembangkan oleh pengajar pada saat memberikan pendidikan ( berlangsungnya proses belajar mengajarnya ), sedangkan di Universitas Terbuka yang menggunakan sistem belajar jarak jauh tujuan kurikuler mencakup tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum dikembangkan oleh penulis modul dan dicantumkan pada setiap modul, dengan demikian mahasiswa dapat mengetahui maksud dan tujuan pendidikan tersebut.

Tujuan instruksional disamping merupakan tujuan suatu pendidikan juga berfungsi sebagai kriteria ( parameter ) untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan instruksional melalui evaluasi. Evaluasi pendidikan meliputi :

- a. evaluasi mahasiswa
- b. evaluasi pengajar
- c. evaluasi proses belajar.

Ketiga evaluasi tersebut merupakan sarana sebagai kontrol pelaksanaan pendidikan secara komprehensif.

Evaluasi mahasiswa pada umumnya dibedakan menjadi :

1. test formatif
2. test sumatif

hingga saat ini Universitas mengembangkan tes sumatif sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan mahasiswa, sehingga tes ini harus mendapatkan perhatian yang khusus sehingga diharapkan dapat mempertahankan juga menaikkan kualitas lulusan, hasil tes ini merupakan salah satu alat yang dapat dipakai sebagai monitoring mutu tersebut.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan pengkajian modul PIH/PTHI apakah seluruh konsep yang tertuang dalam modul dapat dipahami oleh mahasiswa.

### KHUSUS

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui

1. Konsep atau bagian manakah yang dirasakan sulit dipahami oleh mahasiswa.
2. apakah penulisan modul sudah sesuai dengan sistem belajar jarak jauh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, termasuk dalam jenis penelitian diskriptif, sebagai bahan dalam revisi bahan belajar ( modul )

### VARIABEL

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah materi (modul) PIH PTHI sedangkan variabel bebasnya adalah nilai / hasilnya ujian mahasiswa dengan variabel antara Panduan Penulisan Modul melalui SBJJ.

### HIPOTESA

Penulis menarik suatu hipotesa bahwa apabila lebih dari 50 % mahasiswa menjawab salah terhadap suatu soal, ada kemungkinan terjadinya.

- kesulitan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada di dalam modul, yang dise

babkan oleh kekurang jelasan penyampaian suatu konsep di dalam modul.

POPULASI                    Populasi dari penelitian ini meliputi hasil  
SAMPel                      ujian mahasiswa mata kuliah PIH PTHI serta  
modul PIH PTHI.

#### METODE PENARIKAN SAMPEL

Metode penarikan / pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik area sampling yaitu dengan jalan penentuan soal soal untuk masa ujian 89.1 dan 89.2 yang 50% atau lebih dari peserta ujian menjawab salah.

#### TEKNIS PENELITIAN

Tahap pertama membuat parameter penelitian dari hasil ujian mahasiswa dengan mengklasifikasikan antara yang mudah, sedang dan kurang dipahami oleh mahasiswa, selanjutnya mengambil soal soal yang kurang dipahami ( 75% lebih mahasiswa menjawab salah ) untuk dilihat kualitas soalnya dalam analisi item, apabila kualitasnya baik selanjutnya dilihat dalam materi modulnya apakah penyajian konsepnya mudah untuk dipahami ( dengan patokan panduan penulisan modul dengan SBJJ ), lalu dilakukan analisa.

## ANALISA DATA

Analisa data dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, data data yang dilakukan analisa antara lain :

1. hasil analisis item
2. nilai ujian mahasiswa masa ujian 89.1 dan 89.2
3. soal soal ujian masa uji 89.1 dan 89.2
4. modul PIH dan PTHI.

Data data sekunder yang diambil di lapangan didasarkan pemikiran bahwa kesenjangan antara mahasiswa dan dosen yang disebabkan karena keterbatasan ruang, interaksi dan fasilitas fasilitas lainnya sebagai pendukung sistem belajar jarak jauh, dengan adanya keterbatasan keterbatasan tersebut sulit kiranya dosen untuk memantau proses belajar mengajarnya, dari pengalaman ini peneliti menggunakan data data diatas untuk memantau kegiatan proses belajar mengajar di FISIP khususnya untuk mata kuliah PIH / PTHI. ketiadaan tatap muka secara langsung mengakibatkan kesulitan bagi dosen sistem belajar jarak jauh untuk memantau proses belajar mengajarnya. Sebagai upaya tersebut peneliti mengambil langkah langkah untuk melakukan pengkajian bahan belajar ( modul ) melalui hasil evaluasi belajar mahasiswa.

Tahap tahap penganalisaan data meliputi :

- a. mengelompokkan prosentase nilai mahasiswa untuk masa ujian 89.1 dan 89.2 untuk melihat distribusi nilai nilai tersebut.
- b. tahap kedua memilih soal soal yang dijawab salah oleh lebih dari 50 % sampel mahasiswa yang mengikuti ujian (  $P, 0.500$  )
- c. dari hasil analisa tahap diatas dipilih soal soal yang baik , memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka, antara lain :
  - c.1. soal soal yang mempunyai  $R_{sbis} > 0.200$  ( daya beda butir soal ) yang menunjukkan perbandingan antara amasiswa yang menjawab benar pada kelompok atas ( pandai ) dengan mahasiswa yang berada pada kelompok bawah ( kurang pandai ) .
  - c.2.  $R_{bis}$  kunci jawaban positif dan  $> 0.200$  dan lebih besar dari  $R_{bis}$  distraktor.
- d. hasil analisa tahap ketiga dilihat dan dikelompkkan apakah

distraktor dapat berfungsi dengan baik yaitu dipilih oleh kurang lebih 5 % responden.

### ANALISA SECARA KUALITATIF

sumber sumber data yang telah dianalisa secara kuantitatif merupakan bahan utama untuk penganalisaan lebih lanjut berdasarkan pada kriteria kualitatif mencakup :

1. melihat apakah sumber materi soal sesuai atau ada di dalam modul ( content validity ) atau tidak. hal ini dipakai patokan bahwa :  
sumber utama bahan belajar adalah modul sehingga evaluasi pemahaman bahan belajar didasarkan pada kemampuan menguasai modul tersebut dan alat alat evaluasinyaapun harus sesuai dengan tujuan instruksional yang ada.
2. melihat apakah stem soal sudah sesuai dengan konstruksi pembuatan soal yang baik ( format validity ).
3. setelah kedua tahap tersebut melihat pada konsep konsep yang terdapat dalam modul disesuaikan dengan pokok pokok bahasan yang dirasa sulit dipahami berdasarkan analisi sumber sumber data terdahulu.

a. ANALISA SECARA KUANTITATIF mencakup beberapa tahap :

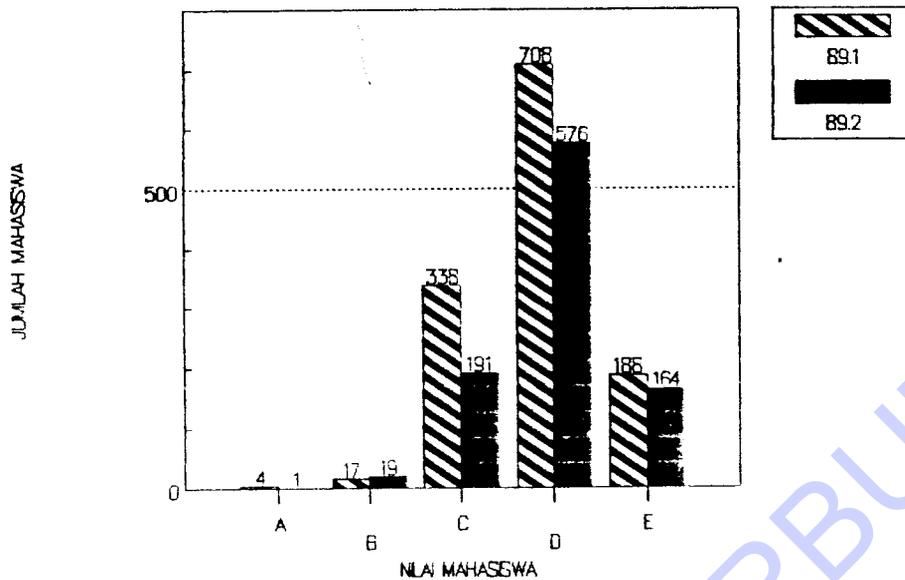
- a.1. Mengelompokkan prosentase nilai mahasiswa untuk masa ujian 89.1 dan 89.2, hal ini diperlukan untuk melihat distribusi ( penyebaran ) nilai mahasiswa, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel

Masa ujian 89.1

nilai	A	B	C	D	E
jum. Maha- siswa 89.1	4	17	338	708	188
jum. Maha- siswa 89.2	1	19	191	576	164

sumber : Pusat Pengujian UT. FEB.1990

## PERBANDINGAN NILAI MAHASISWA



Penilaian diatas dilakukan berdasarkan katagori penilaian ( grade ) I standard penilaian UT. Dari data tersebut terlihat bahwa pada maswa ujian 89.1 terdapat 71.39 % mendapatkan nilai kurang ( D kebawah ) dan 28.6 % mendapatkan nilai sedang keatas ( c keatas ) .

Untuk masa ujian 89.2 terdapat 77.83 % mahasiswa mendapatkan nilai kurang , dan 22.2 % mendapatka nilai sedang keatas. Dilihat dari proporsi nilai tersebut terdapat ketidak seimbangan distribusi nilai dari kedua masa ujian tersebut masih terdapat 70 % lebih mahasiswa mendapatkan nilai kurang. Prosentase tertinggi masih terdapat pada nilai D kurang lebih 60 % dan nilai E kurang lebih 15 %, sedangkan yang mendapat nilai baik A tidak ada 1 % , nilai B kurang dari 2 %. dari data tersebut dapat saya trik kesimpulan sementara bahwa kurang lebih 75 % mahasiswa untuk masa ujian 89.1 dan 89.2 mendapatkan nilai kurang dengan demikian, hampir 75 % mahasaswa tidak menguasai benar modul PIH / PTHI

a.2. Tahap kedua memilih soal soal yang dijawab salah oleh lebih dari 50 % mahasiswa, melalui data analisis item dikelompokkan soal soal yang mempunyai niali  $P < 0.500$ .

TAHAP II ( kedua )

SOAL YANG MEMPUNYAI  $P < 0.500$

JUMALAH SAMPEL 538

SD : 5.90

KR-20 : +0.665

MASA UJIAN 89.1

NO	NO SOAL	MODUL	KB	J. KEMAMP.	Q	RBIS	KET.
1	2		1	C2	0.695	+0.237	
2	3		1	C3	0.911	+0.181	
3	4		1	C6	0.862	-0.192	
4	5		2	C3	0.528	+0.405	
5	7		2	C3	0.615	+0.227	
6	8		3	C2	0.582	-0.107	
7	9		3	C2	0.554	+0.356	
8	10		3	C2	0.621	+0.363	
9	11		3	C2	0.732	+0.147	
10	12		4	C1	0.368	+0.205	
11	13		4	C2	0.803	+0.195	
12	18		5	C2	0.600	+0.281	
13	20		5		0.437	+0.424	
14	22		6	C2	0.602	+0.273	
15	23		6	C2	0.664	+0.200	
16	24		6	C3	0.723	+0.234	
17	26		7	C2	0.526	+0.132	
18	27		7	C6	0.721	+0.164	
19	28		7	C4	0.697	+0.305	
20	30		7	C2	0.556	+0.286	
21	31		8	C2	0.796	+0.156	
22	32		8	C3	0.861	-0.144	
23	35		9	C2	0.626	+0.359	
24	37		9	C1	0.658	+0.334	
25	38		9	C2	0.914	+0.271	
26	39		3		0.965	+0.110	
27	40		1	C2	0.762	+0.020	
28	42		2	C2	0.686	+0.058	
29	43		3	C3	0.612	+0.119	
30	44		4	C1	0.619	+0.253	
31	45		5	C4	0.742	+0.054	
32	46		5	C2	0.665	+0.042	
33	47		6	C5	0.911	+0.153	

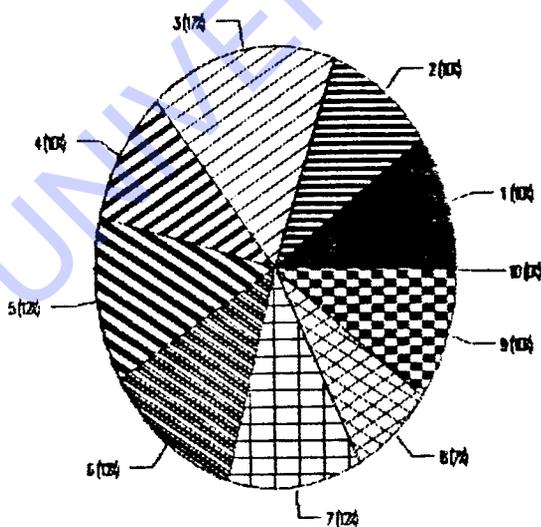
NO	NO SOAL	MODUL	KB	J.KEMAMP.	Q	RBIS	KET.
34	50		8	C4	0.587	+0.093	
35	51		9	C4	0.699	+0.117	
36	53		2	C2	0.526	+0.207	
37	54		3	C6	0.786	+0.151	
38	55		4	C2	0.710	+0.114	
39	57		6	C2	0.907	+0.144	
40	58		5	C4	0.504	+0.108	
41	59		7	C2	0.528	+0.434	

SOAL YANG MEMPUNYAI  $P < 0.500$   
 JUMLAH SAMPEL 948  
 SD : 5.42  
 KR-20 : +0.569  
 MASA UJIAN 89.2

NO	NO SOAL	MODUL	KB	J.KEMAMP.	Q	RBIS	KET.
1	2		1	C3	0.910	+0.084	
2	4		1	C6	0.632	+0.166	
3	7		3	C2	0.667	+0.235	
4	8		3		0.662	+0.256	
5	9		3		0.724	+0.284	
6	10		4	C2	0.935	+0.185	
7	12		4	C2	0.773	+0.135	
8	14		5	C2	0.636	+0.050	
9	17		7	C3	0.741	+0.223	
10	18		7	C2	0.611	+0.256	
11	20		8	C2	0.558	+0.118	
12	21		8	C3	0.604	+0.279	
13	22		9	C2	0.751	+0.088	
14	24		10	C2	0.570	+0.193	
15	25		11	C2	0.711	+0.155	
16	26		11	C2	0.749	+0.149	
17	27		12	C2	0.782	+0.135	
18	28		12	C4	0.860	+0.118	
19	29		1	C4	0.677	+0.206	
20	31		3	C2	0.744	+0.240	

NO	NO SOAL	MODUL	KB	J.KEMAMP.	Q	RBIS	KET.
21	32		5	C2	0.642	+0.168	
22	37		9	C6	0.511	+0.263	
23	38		8	C4	0.889	+0.208	
24	39		9	C2	0.778	+0.246	
25	41		10	C4	0.810	+0.055	
26	42		10	C4	0.748	+0.177	
27	44		4	C3	0.698	+0.202	
28	45		2	C2	0.707	+0.219	
29	47		2	C1	0.845	+0.218	
30	48		2	C3	0.535	+0.069	
31	49		7	C4	0.657	+0.170	
32	50		7	C6	0.520	+0.147	
33	51		8	C4	0.522	+0.193	
34	52		9	C2	0.818	+0.284	
35	53		9	C3	0.816	+0.206	
36	54		11	C2	0.727	+0.153	
37	55		11	C2	0.605	+0.122	
38	56		11	C2	0.730	+0.181	
39	57		11	C2	0.597	+0.246	
40	60		12	C2	0.923	-0.019	

SOAL MASA UJI 89.1



Dari hasil analisis tahap kedua , untuk masa ujian 89.1 terdapat 41 buah soal dari 60 soal yang dijawab salah oleh lebih dari 50 % mahasiswa , sedangkan untuk masa ujian 89.2 terdapat 40 soal. dari kedua masa ujian terdapat kurang lebih 66.67 % soal yang dijawab salah oleh lebih dari separoh mahasiswa, hanya kurang lebih 20 soal yang terjawab dengan benar oleh keseluruhan mahasiswa.

a.3. Dari hasil analisa diatas dipilih soal soal yang memenuhi kriteria baik yang telah ditentukan oleh Universitas Terbuka antara lain memenuhi kriteria :

- Soal soal yang mempunyai R bis .0.200 ( daya beda butir soal ) yang menunjukkan perbandingan antara mahasiswa yang menjawab benar pada kelompok atas ( pandai ) dengan mahasiswa pada kelompok bawah ( kurang pandai )
- R bis kunci positif dan  $> 0.200$  dan lebih besar dari nilai R bis distraktor.

TAHAP III ( ketiga )

2. SOAL SOAL YANG MEMENUHI KUALITAS BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNIVERSITAS TERBUKA.

A. SOAL YANG MEMPUNYAI  $R_{bis} > 0.20$

B. SOAL YANG KUNCI JAWABAN MEMILIKI  $R_{bis} + DAN > R_{bis}$  DISTRAKTOR

MASA UJIAN 89.1

NO	NO SOAL	MODUL	J.KEMAMP.	A	B	KET.
1	2	1	C2	+0.237	-	
2	5	2	C3	+0.405	-	
3	7	2	C3	+0.227	-	
4	9	3	C2	+0.356	-	
5	10	3	C2	+0.363	-	
6	12	4	C1	+0.205	-	
7	18	5	C2	+0.281	-	
8	20	5		+0.424	-	
9	22	6	C2	+0.273	-	
10	24	6	C3	+0.234	-	
11	28	7	C4	+0.305	-	
12	30	7	C2	+0.286	-	
13	35	9	C2	+0.359	-	

NO	NO SOAL	MODUL	J.KEMAMP.	A	B	KET.
14	37		9 C1	+0.334	-	
15	38		9 C2	+0.271	-	
16	44		4 C1	+0.253	-	
17	53		2 C2	+0.207	-	
18	59		7 C2	+0.434	-	

SOAL SOAL YANG MEMPUNYAI KUALITAS BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNIVERSITAS TERBUKA.

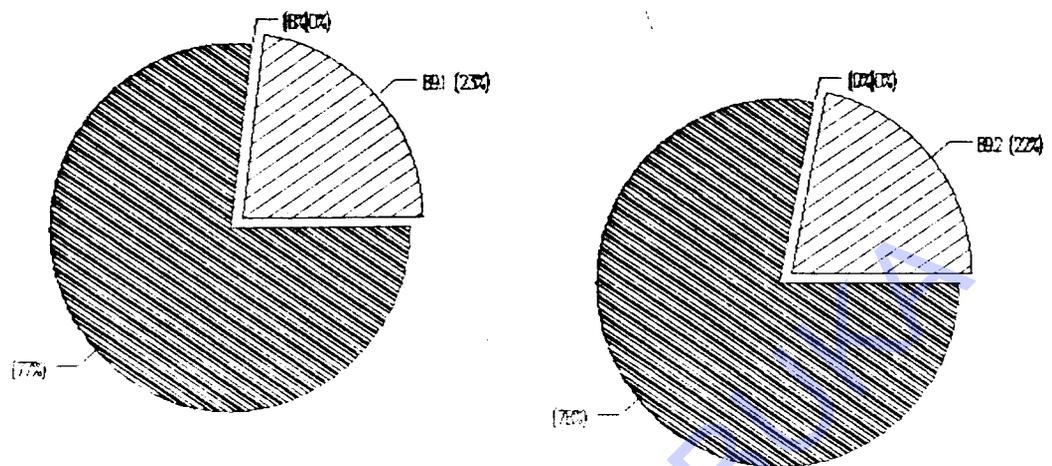
A. SOAL YANG MEMPUNYAI  $R_{bis} > 0.20$

B. SOAL YANG KUNCI JAWABAN MEMILIKI  $R_{bis} + DAN > R_{bis}$  DISTRAKTO

MASA UJIAN 89.2

NO	NO SOAL	MODUL	J.KEMAMP.	A	B	KET.
1	7		3 C2	+0.235		
2	8		3	+0.256		
3	9		3	+0.284		
4	17		7 C3	+0.223		
5	18		7 C2	+0.256		
6	21		8 C3	+0.279		
7	29		1 C4	+0.206		
8	31		3 C2	+0.240		
9	37		9 C6	+0.263		
10	38		8 C4	+0.208		
11	39		9 C2	+0.246		
12	44		4 C3	+0.202		
13	45		2 C2	+0.219		
14	47		2 C1	+0.218		
15	52		9 C2	+0.284		
16	53		9 C3	+0.206		
17	57		11 C2	+0.246		

## PERB. JUMLAH SOAL SETELAH DIANALISIS



Pada tahap ini penulis bermaksud untuk mengetahui dari analisis tahap kedua, yang menghasilkan soal soal yang dijawab salah oleh lebih dari separoh mahasiswa, berapa soal yang dikategorikan baik dalam penyusunannya ( format validity ) . Untuk masa ujian 89.1 dari 40 buah soal terdapat 18 soal yang memenuhi kriteria baik sesuai dengan pedoman penilaian Universitas Terbuka, sedangkan untuk masa ujian 89.2 dari 41 soal terdapat 17 soal yang memenuhi kriteria baik . Dari soal soal yang dijawab salah oleh lebih dari separoh mahasiswa yang mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan " item analisis " terdapat kurang lebih 42.5 % soal dikatakan "baik" ( memenuhi ketentuan sebagai alat evaluasi )

masa ujian	89.1	89.2
jum.soal ( analisis tahap kedua )	40	41
jum.soal ( analisis tahap ketiga )	18	17

**b. ANALISA SECARA KUALITATIF**

Sumber sumber data yang telah dilakukan analisa secara kuantitatif, dilanjutkan penganalisaan secara kualitatif secara garis besar pada tahap ini untuk mengetahui apakah soal soal yang diujikan ada didalam modul, sesuai dengan tujuan intruksionalnya dan untuk melihat bagian modul manakah yang dirasakan sulit untuk dipahami oleh mahasiswa( content validity ). Analisa ini didasarkan kriteria kualitatif mencakup

- b.1 Melihat apakah sumber materi soal sesuai atau ada didalam modul atau tidak , hal ini dipakai sebagai umpan balik bahwa sumber utama evaluasi adalah apa yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi soal . Kisi kisi soal dibuat sebagai dasar pertimbangan sebelum dibuat soal soal ujian, sehingga diharapkan materi evaluasi sesuai dengan tujuan instruksional maupun sesuai dengan materi modul.
- b.2 Setelah dianalisa pada tahap b.1. melihat didalam modul apakah konsep konsep yang terdapat didalam modul, yang dituangkan dalam soal soal ujian mudah untuk dipahami ? kalau terdapat konsep konsep yang dirasakan sulit untuk dipahami mencari upaya apakah yang dapat dilakukan untuk lebih mempermudah pemahaman konsep tersebut ( penambahan glosieries, penjelasan lebih lanjut, ataukah perlu disertai contoh contoh konkritnya )

pada tahap analisi ini juga dilakukan pengkajian apakah pokok bahasan didalam modul telah diuraikan dan dibuat sebagaimana ketentuan sistem belajar jarak jauh, anatra lain mudah untuk dipahami oleh mahasiswa, baik formulasi redaksionalnya maupun alat alat bantu lainnya seperti ragaan , bagan, dan ilustrasi lainnya.

**PENGELOMPOKAN SOAL SOAL DAN DIANALISA MELIPUTI :**

1. APAKAH MATERINYA SESUAI / ADA DI DALAM MODUL  
v : sesuai , - : tidak
2. APAKAH STEM MEMBINGUNGKAN  
v : sesuai , - : tidak

MASA UJIAN 89.1

NO	NO SOAL	MODUL	J.KEMAMP.	1	2	KET.
1	2	1	C2	v	v	
2	5	2	C3	v	v	
3	7	2	C3	-	v	
4	9	3	C2	v	v	
5	10	3	C2	v	v	
6	12	4	C1	v	v	
7	18	5	C2	v	v	
8	20	5		v	v	
9	22	6	C2	v	v	
10	24	6	C3	v	v	
11	28	7	C4	v	-	
12	30	7	C2	v	v	
13	35	9	C2	v	v	
14	37	9	C1	v	v	
15	38	9	C2	v	v	
16	44	4	C1	v	v	
17	53	2	C2	v	v	
18	59	7	C2	v	-	

MASA UJIAN 89.1

soal nomor 1.

Materi ada di dalam modul dan stem soal jelas, pokok bahasan mengenai norma hukum cukup jelas diungkapkan dalam modul, masih harus ada penjelasan mengenai ragaan norma hukum, norma sosial dan norma kesusilaan. norma hukum merupakan tatanan petunjuk tingkah laku yang dibuat oleh manusia , norma hukum termasuk dalam norma sosial karena berupaya untuk mencapai dan menciptakan sesuatu dan juga termasuk sebagai norma kultur karena diciptakan oleh manusia dan dipergunakan untuk menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan.

soal nomor 2

Norma hukum merupakan petrunjuk petunjuk tingkah laku demikian juga norma kesusialaan maupun norma kebiasaan ketiga norma tersebut merupakan pedoman tingkah laku, perbedaan ketiganya terletak dari asal dari norma tersebut terbentuk, norma hukum terbentuk dari karya manusia, norma kesusilaan

terbentuk dari sesuatu yang di idealkan oleh manusia, sedangkan norma kebiasaan terbentuk dari perilaku perilaku masyarakat, Ragaan hal

soal nomor 5

modul satu perlu untuk dijelaskan lebih lanjut.

soal nomor 7

Perlu dilakukan penjelasan yang lebih konkrit terhadap konsep hukum, dasar hukum, pengertian hukum dan standard hukum, karena standard hukum tidak terdapat dalam modul , dan pengertian yang lain kurang jelas diungkapkan dimodul.

soal nomor 28

Hak milik menurut UUPA maupun KUHPERDATA mempunyai sifat yang hampir sama yaitu merupakan hak yang bersifat mutlak kekal dan turun menurun, hak milik merupakan konversi dari hak eigendom dalam BW. Yang berlainan dari pengertian kedua tersebut terletak pada fungsi dari hak milik, dalam UUPA hak milik mempunyai fungsi sosial sedangkan pada BW hak milik bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

soal nomor 59

kekuasaan orang tua terhadap anaknya akan berhenti dalam hal :

- a. diputus oleh hakim
- b. telah dewasa
- c. anak berada dibawah pengampuan, perwalian yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan.

perceraian tidak secara otomatis menghentikan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, , sehingga perceraian bukan merupakan penyebab berhentinya kekuasaan orang tua.

PENGELOMPOKAN SOAL SOAL DAN DIANALISA MELIPUTI :

1. APAKAH MATERINYA SESUAI / ADA DI DALAM MODUL

v : sesuai , - : tidak

2. APAKAH STEM MEMBINGUNGKAN

v : sesuai , - : tidak

MASA UJIAN 89.2

NO	NO SOAL	MODUL	J.KEMAMP.	1	2 KET.
					v
1	7	3	C2	-	v
2	8	3		v	v
3	9	3		v	v
4	17	7	C3	-	v
5	18	7	C2	v	v
6	21	8	C3	v	v
7	29	1	C4	-	v
8	31	3	C2	v	v
9	37	9	C6	v	v
0	38	8	C4	-	v
11	39	9	C2	v	v
12	44	4	C3	v	v
13	45	2	C2	v	v
14	47	2	C1	v	v
15	52	9	C2	-	v
16	53	9	C3	v	v
17	57	11	C2	v	v

MASA UJIAN 89.2

soal nomor 7

Konstruksi hukum merupakan usaha dari praktisi hukum untuk mengembangkan hukum positif melalui penalaran logis dengan ketentuan :

- harus mencakup keseluruhan bidang hukum positif yang bersangkutan, tidak dapat bagian demi bagian.
- tidak ada pertentangan logis di dalamnya , tidak boleh bertentangan dengan azas azas hukum umum.
- harus memenuhi persyaratan keindahan, dalam arti memberikan suatu kejelasan.

pembuatan konstruksi soal pada dasarnya merupakan proses kelanjutan dari penemuan hukum

nomor 29

Ragaan pada hal 5 modul 1 perlu lebih dijelaskan , kedudukan hukum sebagai tatanan tingkah laku dalam masyarakat.

nomor 38

Perbedaan perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan harus dilakukan lebih spesifik.

antara lain, perjanjian kerja bersifat individu, sedangkan perjanjian perburuhan bersifat kolektif.

UNIVERSITAS TERBUKA

## KESIMPULAN

Dari hasil analisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang telah dilakukan menunjukkan

- a. Ditinjau dari format penulisan soalnya , mempunyai kualitas yang cukup baik berdasar item soal maupun naskahnya untuk dipakai sebagai alat evaluasi. Dari kedua naskah soal 89.1 dan 89.2 terdapat kurang lebih 30 % berkualitas jelek, sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka dalam analisis butir soal, dan parameter yang dibuat oleh penulis.

Kurang dari 2 % yang tidak sesuai dengan format penulisan soal seperti yang termaksud dalam pedoman penulisan soal UT.

- b. dari segi content ( isi modul ), mencakup analisa terhadap

1. materi soal terdapat dalam modul / tidak
2. stem soal membingungkan atau tidak
3. konstruksi soal sesuai dengan TIK atau tidak

Keseluruhan soal dalam naskah, materinya terdapat dalam modul, hanya sebagian kecil stem soal yang dirasakan membingungkan, hal tersebut disebabkan oleh konstruksi soal yang kurang baik, banyak soal yang tidak sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus sehingga evaluasi yang dilakukan terhadap proses belajar mahasiswa masih belum sesuai dengan tujuan pendidikannya.

Pemahaman materi modul yang diukur melalui evaluasi belajar mahasiswa memberikan gambaran kepada kita apakah tujuan pendidikan yang kita emban dapat berjalan dengan baik, dari penelitian yang penulis lakukan ini penulis mendapatkan kesimpulan

1. Rendahnya nilai mahasiswa disebabkan karena kurangnya

pemahaman terhadap bahan belajarnya ( modul )

2. Konstruksi soal sebagai alat evaluasi sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan kriteria penulisan soal UT, hanya terdapat beberapa soal ( kurang lebih 3 % ) yang mempunyai kualitas jelek.
3. Konstruksi pembuatan soal kurang memperhatikan terhadap tujuan pendidikan, sehingga masih banyak terdapat konstruksi pembuatan soal yang tidak sesuai dengan tujuan instruksional khususnya.
4. Materi bahan belajar ( modul ) cukup mudah untuk dimengerti dan difahami, ada beberapa bagian yang memang harus dijelaskan , dan dimungkinkan penjelasan ragaan harus lebih komprehensif.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa materi bahan belajar ( modul ) PIH PTHI cukup mudah untuk difahami, hanya ada beberapa bagian yang memang perlu untuk ditambahkan uraian maupun ragaan guna untuk mempermudah pemahamannya ( seperti terdapat dalam analisa terdahulu ).

Untuk mengembangkan modul PIH / PTHI perlu diberikan contoh contoh konkrit penjelasan secara filsafati keberadaan hukum dalam masyarakat termasuk pula proses penegakan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. ATWI SUPARMAN, DR. PANDUAN PENULISAN MODUL UNIVERSITAS TERBUKA 1984.
2. ...., PANDUAN PENULISAN MODUL FISIP UNIVERSITAS TERBUKA.
3. MASRI SINGARIMBUN, METODOLOGI PENELITIAN SURVEY, LP3ES 1982.
4. SATJIPTO RAHARDJO, SH. PROF.DR DAN RONNY HANITIYO S, SH, MODUL PIH / PTHI UNIVERSITAS TERBUKA , KARUNIKA 1986.
5. BENYAMIN S.BLOMM, J. THOMAS HASTINGS, GEORGE F MADAUS, HANDBOOK ON FORMATIVE AND SUMATIVE EVALUATION OF STUDENT LEARNING.

*Lampiran*

UNIVERSITAS TERBUKA

KODE NASKAH

17

69.2

PENGANTAR ILMU  
HUKUM/PENGANTAR TATA  
HUKUM INDONESIA  
(ADNE4213)

### PETUNJUK

1. Telitilah kode mata kuliah, jumlah soal, dan jumlah halaman dalam Naskah Ujian ini. Naskah ini terdiri dari 9 halaman yang berisi 60 butir soal. Kalau tidak sesuai laporkan kepada Pengawas.
2. Bacalah setiap petunjuk yang menjelaskan cara menjawab soal dengan cermat!
3. Jawaban yang salah tidak akan mendapat denda.
4. Jawaban setiap butir soal harus sesuai dengan nomor pada Lembar Jawaban Ujian (LJU).
5. Jangan sekali-kali mencoret LJU, gunakan halaman kosong yang ada pada Naskah Ujian untuk keperluan hitung-menghitung.
6. Tidak diperkenankan meminta penjelasan kepada siapa pun yang berkaitan dengan soal.
7. ~~Boleh~~/tidak boleh menggunakan kalkulator.
8. Naskah Ujian ini ~~dilampiri~~/tidak dilampiri tabel/rumus (.. halaman).
9. LJU tidak boleh kotor, basah, terlipat, dan robek!
10. Periksa kembali penghitaman Kode mata kuliah, NIM, penulisan Nama, dan tanda tangan Anda pada LJU sebelum diserahkan kepada Pengawas.
11. Serahkan kembali Naskah Ujian bersama LJU kepada Pengawas.



**UJIAN**  
**PENGANTAR ILMU HUKUM/PENGANTAR TATA**  
**HUKUM INDONESIA**  
**(ADNE4213)**

**PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI 28, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!**

1. Menurut G. Radbruch hukum itu mengandung nilai dasar berupa
  - A. keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.
  - B. keamanan, ketertiban dan ketenteraman.
  - C. kepastian, keramfaatan dan tertib hukum.
  - D. kepastian, ketertiban, keamanan.
  
2. Sanksi dari norma kesusilaan adalah
  - A. positif.
  - B. negatif.
  - C. heteronom.
  - D. otonom.
  
3. Tataan yang mampu mengambil jarak antara ideal dan kenyataan adalah
  - A. Tataan hukum.
  - B. Tataan kesusilaan.
  - C. Tataan kebiasaan.
  - D. Tataan sosial.
  
4. Konsep yang menyatakan bahwa kehidupan hukum tidak pernah final, melainkan merupakan suatu perjuangan, pada hakikatnya pencerminan dari
  - A. Hukum Positif.
  - B. Hukum Alam.
  - C. Hukum Kebiasaan.
  - D. Norma Hukum.
  
5. Untuk timbulnya suatu akibat hukum diperlukan suatu syarat yang disebut
  - A. dasar hukum.
  - B. objek hukum.
  - C. dasar peraturan.
  - D. subjek hukum.
  
6. Contoh-contoh dari "principles of legality" seperti yang dikemukakan oleh Lon. L. Fuller adalah
  - A. Suatu peraturan boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
  - B. harus ada persesuaian (kecocokan) antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.
  - C. peraturan-peraturan tidak perlu disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
  - D. suatu peraturan tingkat atas dapat bertentangan dengan peraturan dibawahnya

7. Pengembangan lebih lanjut dari bahan hukum positif dengan menggunakan penalaran logika dalam melakukan penerapan hukum dinamakan oleh Paul Scholten sebagai
  - A. konstruksi hukum.
  - B. fiksi hukum.
  - C. kodifikasi.
  - D. penemuan hukum.
  
8. Berbeda dengan pemilikan, maka pada orang yang hanya menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan tidak ada padanya karena adanya
  - A. asas ius in re aliena.
  - B. asas ius personam.
  - C. asas in memorial.
  - D. asas memo dat quod non habet.
  
9. Suatu pendapat yang mengatakan bahwa fungsi hukum di dalam masyarakat sebagai "tool of social engineering," dikemukakan oleh
  - A. Roscoepond
  - B. Aristoteles.
  - C. Ulpianus.
  - D. Herbert Spencer.
  
10. Berdasarkan pendekatan sosiologis dari Emile Durkheim maka penjatuban hukuman pidana dalam masyarakat didasarkan atas faktor
  - A. solidaritas empirik.
  - B. solidaritas mekanik.
  - C. solidaritas organik.
  - D. solidaritas sosial-normatif.
  
11. Atas dasar berbagai pengertian dari Hukum Alam yang telah tumbuh berabad-abad, Hukum Alam dapat dibedakan atas
  - A. Hukum Alam sebagai substansi dan sebagai metode.
  - B. Jus Civile dan Jus Gentium.
  - C. Ius Constitutum dan Ius Constituendum.
  - D. Positivisme dan Utilitarianisme
  
12. Pendapat bahwa kodifikasi hukum tidak penting karena bertentangan dengan hakikat dari setiap sistem hukum sebagai pencerminan jiwa dari rakyat yang mengembangkan hukum itu, dikemukakan oleh
  - A. aliran Positivisme.
  - B. aliran Sejarah.
  - C. aliran Anthropologi.
  - D. aliran Modern.
  
13. Menurut Eugen Ehrlich pusat gaya tarik dari perkembangan hukum terletak
  - A. pada perundang-undangan.
  - B. pada ilmu hukum.
  - C. pada putusan hakim.
  - D. pada masyarakat itu sendiri.

14. Dalam penerapan traktat berlaku sebuah asas yaitu "pacta sunt servanda" yang artinya.
- perjanjian harus diratifikasi.
  - perjanjian harus ditaati oleh para pembuatnya.
  - perjanjian harus diberi bentuk tertentu.
  - perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya.
15. Pelaksanaan Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif, diatur di dalam
- Undang-undang.
  - Keputusan Presiden.
  - Peraturan Pemerintah.
  - Instruksi Presiden.
16. Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan disebut Hukum Keluarga; yang tidak termasuk dalam pengertian hukum keluarga adalah
- hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum mengenai perceraian.
  - kekuasaan orang tua.
  - pengampuan
  - hukum perjanjian.
17. Seorang anak yang berada di bawah perwalian ibunya setelah ayahnya meninggal dunia, dikatakan sebagai anak yang berada di bawah perwalian karena
- undang-undang (wettelijke voogdij).
  - surat wasiat (testamentaire voogdij).
  - penunjukan hakim (datieve voogdij).
  - hukum (rechtelijke voogdij).
18. Putusan Pengadilan yang menyatakan seseorang ditaruh di bawah pengampuan (curatele) harus dimuat di dalam
- Lembaran Negara.
  - Tambahan lembaran negara.
  - Berita Negara.
  - Tambahan Berita Negara.
19. Prof. Van der Pot menyebut empat syarat yang harus dipenuhi, agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yaitu seperti tersebut di bawah ini, kecuali
- ketetapan harus dibuat oleh organ yang berwenang.
  - ketetapan harus dibuat dengan persetujuan DPR.
  - ketetapan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan dasarnya.
  - isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

20. Perjanjian perburuhan itu merupakan perjanjian yang diadakan antara majikan dengan pihak
- buruh.
  - tenaga kerja.
  - karyawan.
  - Serikat Buruh
21. Pengertian tanah pertanian. "absentie" menurut UUPA adalah
- tanah pertanian yang tidak dikerjakan oleh pemiliknya karena sakit atau berbalangan.
  - tanah pertanian yang pemiliknya sedang pergi keluar negeri sehingga tidak dapat mengerjakan tanahnya.
  - tanah pertanian yang pemiliknya berdomisili di lain kecamatan dari kecamatan tempat tanah tersebut.
  - tanah pertanian yang pemiliknya meskipun di kecamatan lain namun masih mampu mengerjakan tanah tersebut karena jaraknya relatif dekat.
22. Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian-besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Definisi tersebut dikemukakan oleh
- Oppenheim.
  - Starke.
  - Utrecht.
  - Duguit.
23. Di negara Anglo Saxon, Hukum Perdata Internasional dari negara tersebut menentukan bahwa yang berlaku bukan hukum orang asing, tetapi hukum tempat di mana orang asing itu tinggal. Hal ini berarti negara tersebut menganut
- Lex originis.
  - Lex Domisili.
  - Lex rei sitae.
  - Lex specialis.
24. Gambaran stereotipis aparat penegak hukum, mencerminkan adanya dua kepentingan yang saling berbeda bahkan saling bertentangan. Keadaan semacam itu merupakan bidang pendekatan secara
- antropologis.
  - sosiologis.
  - empiris.
  - dogmatis.
25. Eksekusi putusan hakim dalam perkara pidana dilakukan oleh
- panitera.
  - jaksa.
  - ketua lembaga pemasyarakatan.
  - hakim.

26. Mengesampingkan perkara pidana demi untuk kepentingan umum merupakan wewenang
- A. Kapolri.
  - B. Jaksa Agung.
  - C. Mahkamah Agung.
  - D. Menteri Kehakiman.
27. Surat gugatan yang berisikan permohonan dari penggugat disebut sebagai
- A. fundamentum petendi.
  - B. petitum.
  - C. duplik.
  - D. verstek.
28. Putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dapat dimintakan banding dalam hal
- A. tergugat tidak hadir.
  - B. penggugat tidak hadir.
  - C. tergugat tidak menerima.
  - D. penggugat ditalakkan.

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 29 SAMPAI 43, PILIHLAH:

- A. JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB!
- B. JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB!
- C. JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN SALAH, ATAU JIKA PERNYATAAN SALAH, ALASAN BENAR!
- D. JIKA PERNYATAAN DAN ALASAN KEDUANYA SALAH!

29. Hukum berdasarkan otoritasnya meramu pada ideal-filosofik dan tuntutan sosiologik, tetapi tidak mutlak pada dunia kenyataan.

sebab

Apabila tatanan hukum dibandingkan dengan tatanan kebiasaan maka tatanan hukum sudah mulai melepaskan diri dari keterikatannya yang besar daripada dunia kenyataan.

30. "Analogi" dan "penghalusan hukum" adalah cara-cara untuk membuat konstruksi hukum.

sebab

Analogi merupakan konstruksi dari spesies ke genus agar mencakup spesies lainnya sedangkan penghalusan hukum merupakan konstruksi dari genus ke spesies.

31. Hak yang ada pada seorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan

sebab

Setiap hak menurut hukum harus mempunyai titel

32. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

sebab

Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

33. Seseorang yang melanggar UU yang telah diundangkan di dalam Lembaran Negara, tidak dapat membela diri dengan menyatakan bahwa ia belum mengetahui adanya UU tersebut.

sebab

Di dalam Hukum berlaku suatu fiksi bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang.

34. Menurut hukum perdata setiap orang berhak melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegd) namun tidak setiap orang mampu melakukan perbuatan hukum (handelings on bekwaam).

sebab

Kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh keputusan hakim.

35. Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

sebab

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hadiah menjadi harta bersama.

36. Menurut KUH Perdata manusia menjadi subjek hukum sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia.

sebab

Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

37. Hukum Indonesia mengenai Subjek Hukum Perorangan tetap berlaku bagi yang bersangkutan, meskipun yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.

sebab

Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving menentukan bahwa bagi warganegara Indonesia diberlakukan Statuta personalia.

38. Pengertian "perjanjian kerja" dan "perjanjian perburuhan" mempunyai pengertian yang sama/identik.

sebab

Baik perjanjian kerja maupun perjanjian perburuhan, keduanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan kondisi kerja.



45. Di bawah ini adalah contoh-contoh dari peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum
- 1) peraturan-peraturan yang tergolong hukum acara
  - 2) peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi atau mengubah isi dari peraturan lain
  - 3) peraturan-peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan lain
46. Menurut Lon.L.Fuller, ukuran adanya suatu sistem hukum antara lain adalah
- 1) peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
  - 2) peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
  - 3) peraturan-peraturan tidak boleh mengandung pertentangan satu sama yang lain
47. Asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum, alasannya
- 1) sebagai landasan hukum
  - 2) merupakan rasio logik
  - 3) merupakan etik hukum
48. Antara peraturan hukum dan norma hukum terdapat hubungan yang erat, hal ini sebagai akibat
- 1) peraturan hukum itu merupakan salah satu di antara lambang-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membadankan dirinya
  - 2) peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum
  - 3) dimana ada norma hukum, disitu tentu ada peraturan hukum.
49. Suatu perikatan yang lahir karena undang-undang, antara lain
- 1) alimentasi
  - 2) zaakwaarneming
  - 3) wanprestasi
50. Unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah antara lain
- 1) melanggar hak sesamanya dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri
  - 2) bertentangan dengan kewajiban moral dan kesopanan
  - 3) bertentangan tata keharusan dalam pergaulan masyarakat
51. Pada masa sekarang Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu pengetahuan hukum yang mandiri. Faktor-faktor yang mendorong kemandirian tersebut adalah
- 1) tumbuh dan berkembangnya konsep Negara Kesejahteraan (welfare state)
  - 2) bertambah luasnya lapangan administrasi negara
  - 3) makin luasnya kekuasaan pemerintah

52. Peraturan-peraturan Hukum Perdata Internasional meliputi jenis
- 1) peraturan petunjuk
  - 2) peraturan penentu
  - 3) peraturan asli (berdiri sendiri)
53. Yang merupakan subjek hukum internasional adalah
- 1) negara dan gabungan negara-negara
  - 2) tahta suci, organisasi internasional dan individu
  - 3) negara yang bukan merupakan anggota PBB seperti Swiss, Korea, Monaco
54. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah
- 1) mencegah terjadinya kejahatan
  - 2) memberikan pengimbalan atas perbuatannya
  - 3) memberikan perlindungan kepada masyarakat
55. Dalam kriminologi, kejahatan merupakan interaksi bersama antara faktor
- 1) individual
  - 2) sosial
  - 3) fisik
56. Prinsip-prinsip dari azas *nulum delictum nula puna sine previa lege punale* hukum pidana antara lain
- 1) peraturan pidana tidak boleh berlaku surut
  - 2) peraturan pidana harus lebih dahulu ada daripada deliknya.
  - 3) apabila terjadi perubahan peraturan harus dijatuhkan pidana yang paling meringankan
57. Alat-alat bukti yang dianggap sah dalam hukum pidana antara lain keterangan dari
- 1) terdakwa
  - 2) saksi
  - 3) saksi ahli
58. Hakim dalam perkara perdata sesuai dengan HIR (RIB) bersifat aktif dapat ditunjukkan dari hakim berkewajiban
- 1) membantu penggugat menyusun gugatannya
  - 2) memutus semua perkara
  - 3) mendamaikan para pihak
59. Perbedaan antara sumpah *decisoire* dan sumpah *supletoire* antara lain
- 1) sumpah *decisoire* bersifat menentukan
  - 2) sumpah *supletoire* diajukan oleh para pihak
  - 3) sumpah *supletoire* hanya untuk menambah keyakinan hakim
60. Dalam hukum adat terdapat beberapa cara untuk menghindari terjadinya anak tak sah antara lain
- 1) nikah tambelan
  - 2) pattongkong sirig
  - 3) lilikur



NASKAH UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

HARI KEDUA

NAMA M.K. : PENGANTAR ILMU  
HUKUM/PENGANTAR TATA  
HUKUM INDONESIA

KODE M.K. : ADNE4213

KODE NASKAH : 16

KODE MASA UJIAN: 891

H A R I : MINGGU

TANGGAL : 30-04-1989

WAKTU UJIAN : JAM KE-: 1  
PUKUL : 07.30-09.00  
(WAKTU SETEMPAT)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Terbuka

1989

KODE NASKAH

16

PENGANTAR ILMU  
HUKUM/PENGANTAR TATA  
HUKUM INDONESIA  
(ADNE4213)

### PETUNJUK UMUM

1. Sebelum mengerjakan ujian, telitilah terlebih dahulu kode mata kuliah dan jumlah serta nomor halaman yang terdapat pada Naskah Ujian ini. Naskah ini terdiri dari 10 halaman yang berisi 60 butir soal. Kalau tidak sesuai/lengkap segera laporkan kepada Pengawas Ujian untuk mendapat penggantian.
2. Bacalah setiap petunjuk yang menjelaskan cara menjawab soal dengan cermat!
3. Waktu untuk mengerjakan Naskah Ujian ini adalah 90 menit.
4. Usahakan agar semua soal terjawab! Jawaban yang salah tidak akan mendapat denda.
5. Tulislah jawaban Anda sesuai dengan jumlah butir soal yang ada dalam Naskah Ujian ini pada Lembar Jawaban Ujian (LJU) yang disediakan dengan cara sebagaimana tersebut dalam petunjuk yang terdapat pada LJU. Harus diingat nomor jawaban pada LJU harus sesuai dengan nomor butir soal pada Naskah Ujian ini.
6. Sebagai kertas buram (untuk keperluan hitung-menghitung) gunakan halaman-halaman yang kosong pada Naskah Ujian ini, jangan sekali-kali mencoret LJU.
7. Dalam mengerjakan soal, Anda tidak diperkenankan meminta penjelasan mengenai soal-soal ujian ini kepada siapa pun. Kerjakan soal-soal tersebut sebagaimana adanya.
8. Setelah Anda selesai mengerjakan Naskah Ujian ini, serahkan LJU beserta Naskah Ujiannya kepada Pengawas Ujian.
9. Perhatikan agar LJU tidak kotor, tidak basah, tidak terlipat, dan tidak robek!

**UJIAN**  
**PENGANTAR ILMU HUKUM/PENGANTAR TATA HUKUM**  
**INDONESIA**  
**(ADNE4213)**

**PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI 39, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!**

1. Pedoman-pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana hendaknya hubungan antar mereka itu dilaksanakan, dapat berupa
  - A. larangan.
  - B. keharusan.
  - C. ketertiban.
  - D. larangan dan keharusan.
  
2. Yang dimaksud dengan norma hukum adalah
  - A. norma-norma yang diangkat dari kebiasaan-kebiasaan dan kesusilaan.
  - B. karya manusia yang berupa norma-norma yang isinya adalah petunjuk tingkah laku.
  - C. semua norma, kecuali kesusilaan dan kebiasaan.
  - D. tatanan tingkah laku yang hidup dalam masyarakat.
  
3. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercapai
  - A. keadilan.
  - B. ketertiban.
  - C. kepastian hukum.
  - D. keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.
  
4. Kitab suci menurut kategori hukum Thomas Van Aquino termasuk hukum
  - A. lex aeterna.
  - B. lex devina.
  - C. lex naturalis.
  - D. ius positivum.
  
5. Untuk membiayai sekolah adiknya, X menjual sebagian kebunnya kepada Y. X dan Y disebut
  - A. subjek hukum.
  - B. objek hukum.
  - C. peristiwa hukum.
  - D. hubungan hukum.
  
6. Kenikmatan yang diperoleh pihak penyewa rumah setelah dibuat perjanjian sewa menyewa rumah, disebut
  - A. dasar hukum.
  - B. akibat hukum.
  - C. peristiwa hukum.
  - D. dasar peraturan.

7. Kemudahan untuk menyesuaikan pada pemahaman baru yang berkembang akan dapat ditampung, bila hukum menggunakan
  - A. konsep hukum.
  - B. standar hukum.
  - C. pengertian hukum.
  - D. dasar hukum.
  
8. Korelasi dari hak dalam arti kekuasaan adalah
  - A. ketidakmampuan.
  - B. ketiadaan hak.
  - C. kewajiban.
  - D. pertanggungjawaban.
  
9. Kekuasaan yang dialokasikan secara terukur, yaitu ditentukan keleluasaan dan kedalaman, disebut
  - A. kewajiban.
  - B. hak.
  - C. konsep.
  - D. kewajiban, konsep dan hak.
  
10. Hukum memberikan perlindungan kepada manusia
  - A. sejak lahir sampai meninggal.
  - B. selama ia cakap melakukan perbuatan hukum.
  - C. sebelum lahir sampai setelah meninggal dunia.
  - D. setelah timbulnya hak dan kewajiban.
  
11. Sumber hukum yang bersifat hukum adalah sumber yang
  - A. menimbulkan hubungan hukum.
  - B. menciptakan hukum.
  - C. menimbulkan akibat hukum.
  - D. memperoleh pengakuan legislatif.
  
12. Perkembangan ilmu hukum pada abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan
  - A. kebangkitan hukum alam.
  - B. aliran legisme
  - C. aliran positivisme.
  - D. idealisme Plato.
  
13. Proses konkretisasi mulai dari norma dasar dan penerapannya terhadap situasi tertentu, oleh Hans Kelsen disebut
  - A. Grundnorm.
  - B. Initial hypothesis.
  - C. Stufen theory.
  - D. Paradigmatic.
  
14. Hukum yang berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu yang antara lain mengatur mengenai: perjanjian (kontrak), kebendaan, ajaran tentang kesalahan, termasuk bidang
  - A. hukum positif.
  - B. teori-teori hukum.
  - C. filsafat hukum.
  - D. konsep hukum.

15. Menurut Aristoteles, hukum bisa keras dan menimbulkan ketidakadilan, hal tersebut dapat dicerminkan oleh
  - A. hukum itu berbicara dalam bahasa yang umum, sedangkan tidak semua perkara bisa dimasukkan ke dalam pengaturan yang bersifat umum tanpa resiko menimbulkan ketidakadilan.
  - B. hukum itu dibuat oleh manusia yang tidak terlepas dari nafsu jahatnya.
  - C. hukum itu hanyalah pencerminan kehendak dari badan legislatif.
  - D. hukum itu berbeda-beda antara negara, yang satu dengan negara yang lain.
  
16. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan
  - A. Keputusan M.P.R.
  - B. Undang-undang.
  - C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  - D. Undang-Undang Dasar.
  
17. Berdasarkan peraturan perundang-undangan penduduk Hindia Belanda dibagi dalam beberapa golongan yaitu
  - A. golongan Eropa, golongan Bumi Putera.
  - B. golongan Timur Asing, golongan Eropa, golongan Arab.
  - C. golongan Indonesia, golongan Timur Asing, golongan Eropa, golongan Jepang.
  - D. golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putera.
  
18. Fungsi Peraturan Peralihan yang ada dalam setiap Undang-Undang Dasar adalah
  - A. memperlakukan peraturan-peraturan Tata Hukum yang lama dalam situasi Tata Hukum yang baru.
  - B. menyatakan tidak berlakunya lagi UUD yang lama.
  - C. memberikan keleluasaan kepada Tata Hukum yang baru untuk membuat peraturan-peraturan organik yang diperlukan.
  - D. menyatakan tidak berlakunya Tata Hukum yang lama.
  
19. Hukum Nasional Indonesia bersifat
  - A. pengayoman, kekeluargaan, tradisional.
  - B. toleransi, pengayoman, emosional.
  - C. kekeluargaan, toleransi, tradisional.
  - D. pengayoman, toleransi, kekeluargaan.
  
20. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya hanya mengikat ke dalam Majelis (sesama anggota) disebut
  - A. Ketetapan M.P.R.
  - B. Keputusan M.P.R.
  - C. Peraturan M.P.R.
  - D. Kebijakan M.P.R.
  
21. Menurut UU No. 4 tahun 1978 jumlah anggota DPA adalah
  - A. 60 orang.
  - B. 92 orang.
  - C. 45 orang termasuk pimpinannya.
  - D. 70 orang termasuk pimpinannya.

22. Pembagian kekuasaan secara horisontal di dalam suatu negara menyebabkan timbulnya
- A. berbagai macam lembaga negara.
  - B. berbagai macam kekuasaan horisontal.
  - C. macam-macam departemen pemerintahan.
  - D. macam-macam tipe penguasa.
23. Menurut konvensi Jamaika 10 Desember 1982 zone ekonomi eksklusif suatu negara adalah
- A. 12 mil.
  - B. 200 mil.
  - C. 200 mil dari titik terdalam.
  - D. tergantung kebutuhan negara yang bersangkutan.
24. Seorang anak keturunan suatu bangsa yang menganut azas ius soli dan dilahirkan di negara lain yang menganut azas ius sanguinis, akan berstatus
- A. apatride.
  - B. bipatride.
  - C. monopatride.
  - D. multipatride.
25. Sistem Ministeriil adalah suatu sistem Kabinet di mana Menteri-Menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab kepada
- A. Presiden.
  - B. DPR/Parlemen.
  - C. MPR.
  - D. Presiden dan MPR.
26. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang ditaruh di bawah pengampunan harus diumumkan di dalam
- A. Berita Negara.
  - B. Lembaran Negara.
  - C. Tambahan Lembaran Negara.
  - D. mass media.
27. Hukum Perorangan (personenrecht) mengatur hal-hal yang disebut di bawah ini, kecuali
- A. manusia sebagai subjek hukum.
  - B. usia kedewasaan.
  - C. kecakapan untuk memiliki hak-hak.
  - D. menempatkan seseorang di bawah pengampunan.
28. Hak milik atas tanah menurut UUPokok Agraria dan menurut KUHPerdato berbeda sebagai akibat
- A. diatur di dalam UU yang berbeda.
  - B. UUPokok Agraria ditetapkan sesudah KUHPerdato.
  - C. Hak atas tanah menurut UUPA mempunyai fungsi sosial.
  - D. Hak atas tanah menurut KUHPerdato mempunyai fungsi sosial.

29. Bagian dari seorang ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang disebut
- A. legitieme portie.
  - B. inbreng.
  - C. kompensasi.
  - D. somasi.
30. Dengan dikeluarkannya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, maka ketentuan di dalam Buku II KUHPerdara yang masih berlaku adalah mengenai
- A. hak Eigendom.
  - B. hak erfpacht.
  - C. hak hipotik.
  - D. hak opstal.
31. Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum atas tanah, yang dengan berlakunya UUPA masih tetap diakui adanya selama masih ada. Hal itu dinyatakan di dalam UUPA
- A. pasal 3 UUPA.
  - B. pasal 13 UUPA.
  - C. pasal 23 UUPA.
  - D. pasal 31 UUPA.
32. Perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu atau peraturan majikan ataupun menyalahi ketentuan hukum, disebut
- A. perselisihan kepentingan.
  - B. perselisihan perburuhan.
  - C. perselisihan hak.
  - D. perselisihan kewajiban.
33. Tujuan pembayaran pajak adalah
- A. guna membayar sarana parkir.
  - B. guna membayar pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara.
  - C. guna membiayai izin-izin usaha.
  - D. guna membayar hutang-hutang negara.
34. Di antara orang-orang yang disebut di bawah ini, terdapat orang yang dinamakan swa-pekerja, yaitu
- A. dokter perusahaan.
  - B. buruh bangunan.
  - C. pengacara.
  - D. karyawan bank swasta.
35. Jumlah anggota Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1965 adalah
- A. 11 orang.
  - B. 25 orang.
  - C. 15 orang.
  - D. 10 orang.

36. Badan tertinggi dan badan legislatif PBB adalah
- A. General Assembly.
  - B. Security Council.
  - C. Economic and Social Council.
  - D. International Court Of Justice.
- 37.. Hukum damai adalah
- A. hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara-negara dalam keadaan damai.
  - B. hukum yang mengatur tentang perdamaian antara dua negara yang sedang berperang.
  - C. hukum yang mengatur tata cara perang berakhir.
  - D. hukum yang mengatur syarat-syarat perdamaian.
38. Seorang duta tidak boleh diadili di negara tempat ia bertugas dan tidak boleh diganggu gugat tempat kediamannya. Kekebalan duta yang demikian itu berasal dari
- A. sejarah hukum internasional dimasa lampau.
  - B. perjanjian internasional antara negara-negara.
  - C. kebiasaan internasional yang berkembang dalam praktek.
  - D. surat kepercayaan yang diserahkan oleh duta kepada Kepala Negara.
39. Menurut Paul Scholten untuk pembuatan konstruksi hukum harus memenuhi tiga persyaratan, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan konstruksi itu ialah
- A. kepastian.
  - B. keadilan.
  - C. keindahan.
  - D. kegunaan.

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 40 SAMPAI 51, PILIHLAH:

- A. JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB!
- B. JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB!
- C. JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN SALAH, ATAU JIKA PERNYATAAN SALAH, ALASAN BENAR!
- D. JIKA PERNYATAAN DAN ALASAN KEDUANYA SALAH!

40. Menurut ajaran Aristoteles tentang hukum alam, bahwa akal adalah bagian dari alam.

sebab

Menurut aliran Stoa, bahwa akal Ketuhanan yang abadi memerintah alam semesta.

41. Bahasa hukum menghindari penggunaan ragam bahasa yang puitik.

sebab

Penggunaan ragam bahasa yang puitik di dalam hukum dapat menyebabkan timbulnya tafsir ganda.

42. Obiter dicta adalah merupakan komentar Hakim terhadap suatu perkara dalam menentukan vonis.

sebab

Kata-kata Hakim yang dapat menentukan dalam menentukan keputusan Hakim disebut ratio decidendi.

43. Isteri dalam konsep hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terhadap penguasaan harta bendanya bersifat maritale macht.

sebab

Menurut hukum nasional sekarang sesuai dengan asas emansipasi, maka kedudukan wanita dan pria tentang hak milik berlaku sama.

44. Tipologi hukum yang disusun atas dasar sumbu substantif, bersifat eksternal.

sebab

Sumbu substantif menurut Max Weber tidak menunjuk kepada ukuran-ukuran di luarnya.

45. Menurut Teuku Moh. Radhie SH., Politik Hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai ke arah mana hukum, hendak dikembangkan.

sebab

Politik Hukum berarti kebijaksanaan atau policy dari penguasa.

46. Hakim di Indonesia karena jabatannya berwenang untuk menciptakan hukum dalam kasus tertentu.

sebab

Menurut pasal 20 AB hakim yang menolak mengadili perkara dengan alasan Undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut.

47. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung berhak untuk menilai keserasian isi dari suatu UU terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi.

sebab

Menurut UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki hak menguji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

48. Menurut UUD 1945, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

sebab

Menurut UUD 1945, para menteri sebagai pembantu Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

49. Dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdara (BW), bila golongan pertama masih hidup/ada, maka golongan kedua tertutup haknya untuk mewaris.

sebab

Jika semua golongan ahli waris tidak ada, maka warisan jatuh pada negara, sesudah dikurangi dengan hutang-hutang si pewaris.

50. Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan.

sebab

Jaminan sosial bagi buruh adalah bagian dari upah yang harus dibayarkan oleh majikan kepada buruh.

51. Traktat Bern tanggal 23 Oktober 1924 mengenai pengangkutan barang dan orang dengan kereta api, adalah peraturan penunjuk di dalam Hukum Perdata Internasional.

sebab

Peraturan penunjuk di dalam Hukum Perdata Internasional adalah peraturan yang menunjuk hukum nasional mana yang akan mengatur hubungan yang mengandung unsur asing.

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 52 SAMPAI 60, PILIHLAH:

- A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
- B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
- C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
- D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!

52. Undang-undang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jajahan Belanda dahulu berisi nilai-nilai dasar
- 1) keadilan
  - 2) kegunaan
  - 3) kepastian hukum
53. Menurut Hart, "perintah dengan ancaman kekerasan" di dalam hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut
- 1) ditujukan kepada umum, bukan kepada individu tertentu
  - 2) rumusan perintahnya bersifat umum
  - 3) berlaku terus-menerus
54. Beberapa kelemahan kodifikasi dari perundang-undangan ialah
- 1) anggapan yang berlebihan bahwa kodifikasi itu cukup untuk mengatasi persoalan
  - 2) adanya kemenduaan (ambiguity), ketidakjelasan serta konflik-konflik antara bagian yang kurang dipahami secara ilmu hukum
  - 3) tidak lengkapnya hukum dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi
55. Menurut Sir Henry Maine, masyarakat yang progresif mampu mengembangkan hukum melalui
- 1) fiksi
  - 2) equity
  - 3) perundang-undangan
56. Jawaban atas pertanyaan yang dipikirkan oleh Emile Durkheim tentang masyarakat menjadi satu adalah sebagai berikut
- 1) masalah tertib atau tatanan sosial
  - 2) hukum merupakan mekanisme pengintegrasian
  - 3) hukum merupakan pencerminan dan sekaligus indeks dari solidaritas sosial
57. Menurut ilmu Administrasi Negara, "pemerintahan dalam arti luas" meliputi
- 1) Policy making
  - 2) Executing
  - 3) Controlling
58. Prof. Kusumadi Pudjosewoyo mengatakan dalam bukunya "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia" siapa yang mempelajari Tata Hukum Indonesia bermaksud ingin mengetahui
- 1) tindakan manakah yang melawan hukum
  - 2) bagaimana kedudukan, kewajiban dan wewenang seseorang dalam masyarakat
  - 3) hukum yang berlaku sekarang ini

59. Menurut KUHPerdata (BW), kekuasaan orang tua terhadap anaknya berhenti apabila
- 1) anak telah dewasa atau telah kawin terlebih dahulu sebelum mencapai usia dewasa
  - 2) perkawinan orang tua sudah putus, anak berada di bawah perwalian
  - 3) kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim
60. Dengan dikeluarkannya UUPA No. 5/1960, maka peraturan perundang-undangan kolonial yang tidak berlaku lagi adalah
- 1) Agrarische Wet
  - 2) Domein Verklaring
  - 3) Hipotik di dalam KUHPerdata (BW)

UNIVERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA